

RINGKASAN

Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bidang Perbendaharaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Situbondo, Dini Nuril Fadilah, NIM D42211044 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Nevi Darmayanti, S.E (Pembimbing Lapangan), dan Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Proposal ini menjelaskan tujuan penyusunan laporan magang yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil kegiatan magang yang berlangsung selama 700 jam, setara dengan 4 bulan, dari tanggal 02 September 2024 hingga 3 Januari 2025. Fokus utama dari laporan ini adalah untuk mempraktikkan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menggunakan aplikasi SIRKA di bidang perbendaharaan.

BKAD Situbondo berfungsi sebagai pelaksana dalam urusan pemerintahan terkait keuangan dan aset daerah, dengan salah satu kegiatan utama yaitu pengelolaan keuangan. Penerbitan SP2D merupakan bagian dari tugas pengelolaan keuangan yang dilakukan di bidang perbendaharaan. Proses penerbitan SP2D dimulai ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung kepada Kuasa Bendahara Keuangan Daerah (BUD) di BKAD Situbondo.

Kuasa BUD kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPM serta dokumen pendukung. Jika SPM dinyatakan benar dan dokumen lengkap, akan diproses melalui aplikasi SIRKA, dan dokumen SPM yang telah diverifikasi akan segera diterbitkan menjadi SP2D. SP2D yang telah diterbitkan kemudian akan diproses lebih lanjut hingga diserahkan kepada bank terkait untuk dicairkan. Dengan mempraktikkan penerbitan SP2D, diharapkan keterampilan dalam melaksanakan tugas selama kegiatan magang dapat meningkat.